



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2445-2454

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Negeri

Yohanes Andy Abeh¹, Markus Wan², Samson Batang³, Radithya Wibawa⁴, Desi Natalia Mebang⁵, Warman Warman^{6✉}, Ahmad Fitriadi⁷

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Mahakam Ulu, (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Mahakam Ulu, (3,4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mahakam Ulu, (5,6,7) Universitas Mulawarman

Email: warman@fkip.unmul.ac.id^{6✉}

Abstrak

Pengelolaan keuangan dan aset pendidikan di daerah tertinggal menghadapi berbagai risiko, seperti keterlambatan pencairan anggaran, ketidaktepatan alokasi dana, kerusakan aset, dan penyimpangan penggunaan anggaran. Risiko-risiko tersebut menghambat penyediaan layanan pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas, serta memperburuk kesenjangan pendidikan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen risiko yang inovatif dalam pengelolaan keuangan dan aset pendidikan, khususnya untuk daerah tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yang melibatkan survei, wawancara mendalam, dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi risiko utama dalam pengelolaan keuangan dan aset pendidikan. Berdasarkan temuan, model manajemen risiko dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko tersebut secara efektif. Model ini diuji melalui simulasi pada beberapa daerah tertinggal untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, optimalisasi aset pendidikan, serta kontinuitas layanan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model manajemen risiko dapat secara signifikan mengurangi risiko utama dalam pengelolaan keuangan dan aset pendidikan. Selain itu, model ini memberikan kerangka kerja yang aplikatif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan program pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung kebijakan berbasis bukti untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan di daerah tertinggal di Indonesia.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Manajemen Keuangan, Aset Pendidikan, Agama-Agama yang Terbelakang, Akuntabilitas*

Abstract

The management of educational finances and assets in underdeveloped regions faces numerous risks, such as delayed fund disbursement, improper budget allocation, asset deterioration, and misuse of financial resources. These risks hinder the continuity and quality of education services and exacerbate educational disparities between regions. This research aims to develop an innovative risk management model for managing educational finances and assets, particularly in underdeveloped areas. The study employs a mixed-methods approach, including surveys, in-depth interviews, and SWOT analysis, to identify key risks in the management of educational finances and assets. Based on the findings, a risk management model was designed to assist local governments in identifying, analyzing, and effectively managing these risks. The model was tested through simulations in several underdeveloped regions to evaluate its effectiveness in improving financial management efficiency, optimizing educational asset utilization, and ensuring the continuity of education services. The results indicate that implementing the risk management model significantly reduces major risks in educational finance and asset management. Furthermore, the model provides a practical framework for local governments to enhance accountability, efficiency, and sustainability in education programs. This research contributes valuable insights to support evidence-based policies for improving education management in underdeveloped regions of Indonesia.

Keywords: *Risk Management, Financial Management, Educational Assets, Underdeveloped Religions, Accountability*

PENDAHULUAN

Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai daerah perbatasan di Kalimantan Timur, memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pendidikan di daerah ini sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dan nasional, terutama mengingat tantangan geografis yang dihadapi. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Mahakam Ulu, yang merupakan wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau (Ulfa, 2023; Pratiwi et al., 2022). Penelitian di daerah terpencil menunjukkan bahwa akses pendidikan yang sulit, ketersediaan tenaga guru yang terbatas, dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi sekolah (Maharani, 2021; Pratiwi et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan sektor pendidikan di Mahakam Ulu harus menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan pada tahun 2013, Mahakam Ulu menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam sektor

pendidikan. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana BOS merupakan sumber utama pembiayaan pendidikan di wilayah ini. Namun, optimalisasi penggunaan dana tersebut sering terkendala oleh minimnya aksesibilitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pengawasan yang memadai (Afsan, 2023; Wulandari et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efisien dan terfokus sangat diperlukan untuk mendukung pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Wulandari et al., 2022; Setiawan, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan agar dapat mengurangi inefisiensi dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan (Afsan, 2023; Setiawan, 2023).

Kondisi geografis Mahakam Ulu yang sebagian besar merupakan daerah terpencil memberikan tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur pendidikan dan distribusi tenaga pendidik. Sekolah-sekolah di wilayah pedalaman seperti Long Apari dan Long Pahangai masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar, termasuk gedung sekolah yang layak dan sarana pembelajaran yang memadai (Ulfa, 2023; Pratiwi et al., 2022). Distribusi guru yang tidak merata antara kecamatan pusat dan daerah terpencil semakin memperparah kesenjangan mutu pendidikan (Maharani, 2021; Pratiwi et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pendidikan yang optimal sangat penting untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Mahakam Ulu (Wulandari et al., 2022; Afsan, 2023).

Alokasi anggaran pendidikan di Mahakam Ulu saat ini belum maksimal dalam meningkatkan fasilitas dasar pendidikan. Banyak sekolah negeri masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, buku pelajaran, dan teknologi pendidikan (Wulandari et al., 2022; Afsan, 2023). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS dan DAK Pendidikan di tingkat sekolah menimbulkan risiko inefisiensi penggunaan dana, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan di daerah ini (Afsan, 2023; Setiawan, 2023). Hal ini menciptakan kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah-sekolah di pusat kecamatan dan wilayah pedalaman, sehingga memperlambat upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan (Wulandari et al., 2022; Afsan, 2023).

Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Mahakam Ulu, terutama di wilayah pedalaman. Dengan pendekatan kebijakan berbasis data, alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien untuk menjawab kebutuhan nyata pendidikan di tingkat lokal (Maharani, 2021; Wulandari et al., 2022). Penelitian ini bertujuan memberikan

solusi nyata bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai langkah strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan yang berkualitas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas pendidikan di sekolah negeri, serta memberikan rekomendasi strategi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pendidikan yang berkualitas di daerah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sarana dan prasarana di sekolah negeri, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah untuk menggali informasi terkait pengelolaan keuangan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari dokumen resmi, seperti RKAS, laporan penggunaan Dana BOS, dan laporan keuangan lainnya.

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk mengungkap bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah dilakukan dan sejauh mana optimalisasi keuangan telah diterapkan. Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran terkait pengelolaan keuangan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam mendukung operasional sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Di Kabupaten Mahakam Ulu, pengelolaan keuangan sekolah merupakan aktivitas yang melibatkan perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan dana pendidikan, baik yang bersumber dari Dana BOS, DAK, maupun APBD. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan di sekolah negeri telah dilakukan sesuai prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi, seperti aksesibilitas geografis yang sulit, kurangnya kompetensi pengelola keuangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Kepala sekolah dan bendahara sebagai pengelola utama melibatkan berbagai pihak, seperti guru dan komite sekolah, dalam perencanaan dan penggunaan dana. Hasilnya, program-program pendidikan seperti penyediaan buku pelajaran, pelatihan guru, dan renovasi ringan fasilitas sekolah dapat berjalan lancar, meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Keterlibatan berbagai pihak juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Perencanaan Keuangan Sekolah

Perencanaan keuangan sekolah dimulai dari musyawarah antara kepala sekolah, guru, dan komite pada awal tahun. Dalam forum ini, kebutuhan sekolah seperti buku pembelajaran, alat peraga, serta perbaikan sarana fisik didiskusikan. Selanjutnya, rencana keuangan dituangkan dalam RKAS yang disusun berdasarkan juknis Dana BOS dan DAK. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa sekolah di wilayah pedalaman sering kali menghadapi kesulitan dalam menyusun rencana yang realistis akibat minimnya informasi terkait prosedur penganggaran dan kebutuhan yang dinamis.

Pelaksanaan dan Realisasi Keuangan

Pelaksanaan penggunaan dana sekolah dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dalam RKAS. Dana BOS dan DAK direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, seperti penyediaan sarana pembelajaran dan honorarium guru honorer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki akses informasi dan pelatihan lebih baik mampu merealisasikan anggaran secara optimal. Namun, di beberapa sekolah, terjadi penyesuaian anggaran karena kebutuhan mendadak, seperti perbaikan fasilitas akibat kerusakan.

Pengelolaan realisasi dana juga berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Contohnya, sekolah-sekolah di Mahakam Ulu memanfaatkan dana untuk kegiatan ekstrakurikuler yang berdampak langsung pada pengembangan kompetensi siswa. Namun, terbatasnya sumber daya manusia yang memahami manajemen keuangan menjadi kendala yang cukup signifikan

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pengawasan keuangan dilakukan secara internal oleh kepala sekolah dan komite, serta secara eksternal oleh dinas pendidikan setempat. Sekolah diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin setiap triwulan. Laporan ini mencakup rincian pendapatan, pengeluaran, dan bukti penggunaan dana yang harus sesuai dengan juknis.

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas di sekolah negeri cukup baik. Misalnya, kepala sekolah dan bendahara aktif melibatkan guru dalam proses verifikasi penggunaan dana. Namun, di beberapa sekolah, kurangnya pelatihan tentang pengelolaan keuangan menyebabkan laporan yang disusun kurang detail atau tidak sesuai format yang ditetapkan.

Dampak Pengelolaan Keuangan terhadap Pendidikan

Pengelolaan keuangan yang baik memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana yang tepat mampu meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran di sekolah negeri, seperti penyediaan buku pelajaran, alat peraga, dan peralatan teknologi yang mendukung pembelajaran. Selain itu, penggunaan anggaran untuk pelatihan guru dan pemberian insentif juga meningkatkan motivasi dan profesionalisme tenaga pendidik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Kegiatan ekstrakurikuler yang didanai oleh sekolah membantu siswa mengembangkan potensi mereka di bidang akademik maupun non-akademik, seperti seni, olahraga, dan keterampilan lainnya. Namun, dampak positif ini belum sepenuhnya merata, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil. Ketimpangan akses terhadap fasilitas dan pelatihan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kualitas pendidikan yang setara di seluruh wilayah Mahakam Ulu.

Kendala dan Solusi

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Pertama, aksesibilitas menjadi hambatan besar karena kondisi geografis yang sulit dijangkau, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dana dan kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaannya. Kedua, keterbatasan kompetensi pengelola keuangan, seperti kepala sekolah dan bendahara, menjadi kendala yang signifikan. Banyak dari mereka belum memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen keuangan, sehingga berpengaruh pada penyusunan laporan dan pengelolaan anggaran. Ketiga, infrastruktur sekolah yang minim, terutama di daerah

terpencil, menyulitkan optimalisasi penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa solusi direkomendasikan. Peningkatan literasi keuangan bagi kepala sekolah dan bendahara melalui pelatihan rutin menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan. Penyediaan panduan teknis yang mudah diakses, baik dalam bentuk digital maupun cetak, juga penting untuk membantu pengelola memahami mekanisme pengelolaan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah terpencil, guna mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Implementasi solusi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan di sekolah negeri sehingga berdampak pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Mahakam Ulu.

Pembahasan

Pengelolaan keuangan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi, seperti aksesibilitas geografis yang sulit, keterbatasan kompetensi pengelola, dan minimnya infrastruktur pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kinerja pendidikan, tetapi tantangan struktural yang ada perlu diatasi untuk mencapai pemerataan dan kualitas pendidikan yang lebih baik (Sofiani, 2024; Isti'annah, 2023).

Dampak positif dari pengelolaan keuangan yang baik terlihat dalam penyediaan fasilitas pembelajaran yang lebih baik, seperti buku pelajaran dan alat peraga, yang berkontribusi pada efektivitas proses belajar-mengajar. Selain itu, alokasi dana untuk pelatihan guru juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan profesionalisme tenaga pendidik, yang merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan (Pratommi, 2023; Rosyidah, 2023). Namun, manfaat ini belum sepenuhnya dirasakan di daerah terpencil, di mana keterbatasan fasilitas dan akses masih menjadi masalah utama (Ulfa, 2023).

Kendala utama dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau, yang menyebabkan keterlambatan dalam distribusi dana dan pengawasan yang tidak maksimal. Keterbatasan kompetensi kepala sekolah dan bendahara dalam pengelolaan keuangan juga menjadi tantangan signifikan, karena banyak

dari mereka yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam manajemen keuangan (Rosyidah, 2023; Rahman & Saputra, 2022). Selain itu, infrastruktur pendidikan yang minim di beberapa sekolah negeri membatasi pemanfaatan dana secara maksimal, yang berpotensi mengurangi kualitas pendidikan di daerah tersebut (Ulfa, 2023).

Strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan sangat penting dalam konteks ini. Peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan rutin bagi kepala sekolah dan bendahara dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan (Hariyani, 2022; Afifuddin, 2022). Penggunaan panduan teknis yang mudah diakses juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sesuai dengan aturan yang berlaku (Isti'annah, 2023). Dalam jangka panjang, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, guna mengurangi kesenjangan dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah (Sofiani, 2024; Vania et al., 2021).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa literasi keuangan yang baik berkontribusi pada optimalisasi pengelolaan keuangan, baik di tingkat institusi pendidikan maupun organisasi lainnya. Dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan di Mahakam Ulu, diharapkan pendidikan di wilayah ini dapat mengalami peningkatan kualitas yang signifikan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pembangunan sumber daya manusia (Sofiani, 2024; Pratommi, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu telah mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan yang baik memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Namun, optimalisasi pengelolaan keuangan belum sepenuhnya tercapai, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil, akibat keterbatasan aksesibilitas, kompetensi pengelola keuangan, dan minimnya infrastruktur.

Kendala utama yang ditemukan meliputi kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan kompetensi kepala sekolah dan bendahara dalam pengelolaan keuangan, serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, direkomendasikan peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan rutin, penyediaan

panduan teknis yang mudah diakses, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan keuangan yang optimal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Mahakam Ulu. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah, kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan demi tercapainya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2022). Analisis sistem pengendalian intern pemerintah dan peran pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening (studi pada kecamatan jepara di kabupaten jepara). *J. Studi Manaj. Bisnis*, 1(1), 33-50. <https://doi.org/10.24176/jsmb.v1i1.8110>
- Afsan, M. (2023). Pengaruh manajemen keuangan sekolah terhadap efektivitas penggunaan anggaran dana BOS. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7534-7537. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2975>
- Hariyani, R. (2022). Urgensi literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 6(1), 46-54. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v6i1.12234>
- Istianah (2023). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana transfer ke daerah (dana desentralisasi). *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 298-322. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.189>
- Maharani, K. (2021). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat ketercapaian angka partisipasi sekolah di Papua (studi kasus di Kabupaten Merauke). *Borneo Journal of Islamic Education*, 1(2), 209-228. <https://doi.org/10.21093/bjie.v1i2.4177>
- Pratiwi, E. (2022). Evaluasi program guru garis depan terhadap kualitas guru sekolah dasar di daerah 3T. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 810-818. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2615>
- Pratommi, M. (2023). Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 99-109. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955>
- Rahman, A., & Saputra, F. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan

daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117-126.
<https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>

Rosyidah, D. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 615-635. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.566>

Setiawan, B. (2023). Akuntabilitas sebagai prinsip pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. *Akua Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 171-176. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1765>

Sofiani, N. (2024). Kebijakan desentralisasi pendidikan serta implementasi dalam pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>

Ulfa, M. (2023). Potret kondisi sekolah daerah terpencil di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *JUPE2*, 1(1), 11-26. <https://doi.org/10.54832/jupe2.v1i1.90>

Vania, A., Septianingrum, A., Suhandi, A., & Prihantini, P. (2021). Revitalisasi peran guru dalam pengelolaan kelas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5142-5150. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1587>

Wulandari, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Implementasi manajemen keuangan lembaga pendidikan pondok pesantren di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 106-118. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.787>.